

ABSTRAK

“Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Guna Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah”

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan sangat tergantung pada bagaimana daerah tersebut dalam mendayagunakan sumber dan dana yang menjadi potensi daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpun dana yang bergantung baik untuk membiayai pelaksanaan pemerintah, kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan di daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah . Sehingga hal ini memunculkan tuntutan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumber pendapatan yang berasal dari masyarakat.

Dua prinsip penting yang harus ada dalam suatu pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) yaitu terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Agar perwujudan transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan efektif, maka dibutuhkan suatu perubahan sistem dalam administrasi keuangan yang dapat diterima oleh masyarakat luas dan adanya pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah .Perubahan terhadap sistem administrasi keuangan diharapkan akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *descriptive study* dengan melakukan pendekatan *study kasus* di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Jl Raya Batu Jajar KM 3,8

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat menggunakan pencatatan, pengakuan dan pelaporan akuntansinya dengan *metode accrual basis* dan *single entry accounting* pada pelaksanaannya kedua metode pencatatan dan pengakuan akuntansi tersebut dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pendapatan pajak daerah pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui laporan target dan realisasi pendapatan yang disajikan dan dilaporkan dengan transparan dan akuntabel secara berkala yaitu bulanan, triwulan dan akhir periode.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Transparansi dan Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah